

**PELANGGARAN KODE ETIK OLEH PENYELENGGARA PEMILU
DALAM PEREKRUTAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR**

TESIS

UNIVERSITAS ANDALAS

OLEH :

ANGGRE FANI LESTARI

2220832013



Pembimbing I : Dr. INDAH ADI PUTRI, M. IP

Pembimbing II : Prof. ASRINALDI, M.Si

**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2024

**PELANGGARAN KODE ETIK OLEH PENYELENGGARA PEMILU
DALAM PEREKRUTAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas**

OLEH :

ANGGRE FANI LESTARI

2220832013



Pembimbing I : Dr. INDAH ADI PUTRI, M. IP

Pembimbing II : Prof. ASRINALDI, M.Si

**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2024

ABSTRAK

Prinsip penyelenggara pemilu menjadi standar etik bagi Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas, wewenang serta tanggung jawabnya. Salah satu isu penting dalam penegakan etika penyelenggara pemilu adalah bagaimana proses rekrutmen penyelenggara itu sendiri, seperti rekrutmen Badan Adhoc. Kasus pelanggaran kode etik dalam perekrutan Adhoc seperti yang terjadi dalam perekrutan PPK oleh KPU Kabupaten Tanah Datar menjadi contoh pelanggaran etik akibat tidak profesionalnya penyelenggara dalam menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis dampak pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu dalam perekrutan PPK di KPU Kabupaten Tanah Datar dan mendeskripsikan dan menganalisis peran Bawaslu terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif berdasarkan prinsip Electoral Management Body (EMB). Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan pengumpulan dokumentasi berdasarkan tema yang peneliti teliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Tanah Datar terbukti tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara. Peristiwa tersebut juga berakibat pada para peserta seleksi yang merasa diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara dalam proses rekrutmen. Peserta tersebut merasa bahwa mereka tidak terpilih menjadi Anggota PPK karena diwawancarai bukan oleh orang yang tepat. Adapun dampak positif dari pelanggaran kode etik tersebut adalah peristiwa tersebut menjadi evaluasi bagi penyelenggara khususnya KPU dalam melakukan proses rekrutman PPK untuk Pilkada. Sementara peran Bawaslu dalam menindaklanjuti laporan yang masuk ke Bawaslu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, di sisi lain Bawaslu Kabupaten Tanah Datar tidak profesional dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas pelanggaran yang terjadi dalam perekrutan PPK tersebut. Jika Bawaslu melakukan perannya dengan baik maka peristiwa tersebut dapat dihindari.

Kata Kunci: Pelanggaran Etik, Etika Penyelenggara Pemilu, *Electoral Management Body (EMB)*.

ABSTRACT

Election management principles become ethical standards for election organizers in carrying out their duties, authority and responsibilities. One of the important issues in enforcing the ethics of election organizers is the recruitment process for the organizers themselves, such as Ad Hoc Agency recruitment. Cases of violations of the code of ethics in Ad Hoc recruitment, such as what happened in PPK recruitment by the Tanah Datar Regency KPU, are examples of ethical violations due to the unprofessionalism of organizers in carrying out their roles as they should. This research aims to describe and analyze the impact of violations of the code of ethics by election organizers in recruiting PPK at the Tanah Datar Regency KPU and to describe and analyze the role of Bawaslu in violations of the code of ethics committed by the Tanah Datar Regency KPU. This research uses a qualitative approach with a descriptive research type based on the principles of the Electoral Management Body (EMB). Data was collected using in-depth interview techniques and collecting documentation based on themes researched by researchers. The research results showed that the Tanah Datar Regency KPU was proven to be unprofessional in carrying out its duties, thus affecting the public's trust in the organizers. This incident also resulted in the selection participants feeling that they were treated unfairly by the organizers in the recruitment process. These participants felt that they were not selected as PPK members because they were not interviewed by the right person. The positive impact of the violation of the code of ethics is that this incident becomes an evaluation for the organizers, especially the KPU, in carrying out the PPK recruitment process for the regional elections. Meanwhile, Bawaslu's role in following up on reports submitted to Bawaslu is in accordance with applicable laws and regulations. However, on the other hand, Tanah Datar Regency Bawaslu was not professional in carrying out its supervisory function over violations that occurred in PPK recruitment. If Bawaslu had carried out its role well then this incident could have been avoided.

Keywords: Ethical Violations, Election Organizer Ethics, Electoral Management Body (EMB).